

DAMPAK KERJASAMA BELT AND ROAD INITIATIVE TIONGGOK TERHADAP PEREKONOMIAN TAJIKISTAN TAHUN 2018-2022

Nita Yustia Rahmi¹

Abstract: *Tajikistan and China are countries that have bilateral relations that have existed since 1992 and their relations continued when China issued a foreign policy called One Belt One Road (OBOR) and Tajikistan was the first country to join the policy. In 2016, the policy changed its name to the Belt and Road Initiative (BRI) and was refined institutionally with the same vision. Tajikistan's involvement in this policy has both positive and negative impacts on Tajikistan. The results of this study illustrate that the impacts received by Tajikistan from cooperation within the framework of the Belt and Road Initiative are divided into positive and negative impacts. The positive impact is that infrastructure development in Tajikistan is increasing, the negative impact is that Tajikistan's foreign debt to China is increasing.*

Keywords: *Tajikistan, Tiongkok, Policy, Belt and Road Initiative*

Pendahuluan

Kerjasama internasional merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka, berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini bisa berupa kerjasama bilateral maupun multilateral. Salah satu contoh kerjasama bilateral adalah kerjasama Tajikistan dengan Tiongkok melalui kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Tiongkok pada tahun 2013 yang bernama *One Belt One Road* (OBOR). OBOR merupakan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan perekonomian dan merupakan salah satu kebijakan luar negeri Tiongkok yang menarik perhatian dunia internasional yang diresmikan oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping pada tahun 2013.

Oleh Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, kebijakan ini dipromosikan ke wilayah Eropa serta Asia. OBOR merupakan kebijakan jangka panjang antar wilayah dan program investasi yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan integrasi ekonomi antar negara yang berada di jalur sutra bersejarah Tiongkok. Melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Tiongkok melalui kebijakan tersebut, Tiongkok berusaha menghubungkan ekonomi Eurasia dengan mengembangkan transportasi internasional dan jaringan logistik yang menghubungkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di seluruh Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah dan Eropa (Chiba, 2017).

OBOR terdiri dari 2 komponen utama yaitu *The Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road*. *The Silk Road Economic Belt* sebagai jalur darat bertujuan menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Sedangkan *The 21st Century Maritime Silk Road* sebagai rute laut bertujuan menghubungkan provinsi Tiongkok yang kaya dengan kawasan Asia Tenggara hingga Afrika melalui pelabuhan dan jalur kereta api. Pada tahun 2016, Tiongkok mengubah nama kebijakan *One Belt One Road* (OBOR) menjadi *Belt Road*

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : nitayustiar@gmail.com.

Initiatives (BRI). Kebijakan ini kemudian disempurnakan secara institusional dengan visi yang sama. Perubahan nama ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman akan kata “one” dan tidak mengacu pada *One Tiongkok Policy* maupun bentuk invansi dari Tiongkok (McBride, 2023).

Negara pertama yang memutuskan untuk bergabung dalam kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok ini adalah Tajikistan melalui Presiden Emomali Rahmon. Tajikistan merupakan salah satu pendukung kuat kerjasama BRI, dengan menjadi negara pertama yang mendatangi kerjasama dengan Tiongkok di jalur sutra sabuk ekonomi. Sejak dikeluarkan kebijakan BRI, Tajikistan dan Tiongkok melakukan pertemuan serta mempromosikan pembangunan bersama. Keputusan Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon untuk bergabung dalam kebijakan BRI ialah untuk semakin meningkatkan hubungan bilateral dengan Tiongkok.

Kondisi Tajikistan yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia dengan banyak sumber daya alam tetapi tidak cukup kapasitas teknologi atau integritas pemerintah untuk memperkuat ekonomi negaranya. Tingginya tingkat kemiskinan, investasi asing yang rendah, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, jalan-jalan utama yang menghubungkan antar kota masih banyak yang rusak merupakan kondisi negara Tajikistan (Khusyenov, 2021). Setelah bergabung dengan BRI sejak tahun 2013, hubungan bilateral antara Tajikistan dan Tiongkok menjadi semakin kuat hingga menjadikan Tiongkok sebagai sumber investasi terbesar Tajikistan dan mitra dagang terbesar ketiga, dengan perdagangan bilateral mencapai sekitar 1,51 miliar dolar AS pada 2018 (Changani, 2021).

Pada bidang ekonomi, Tiongkok dan Tajikistan telah membentuk berbagai platform kerjasama pemerintah, termasuk komite kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pemerintah Tiongkok dan Tajikistan, Komite kerjasama sains dan teknologi, serta platform interaksi dan komunikasi. Tajikistan juga memberikan dukungan kepada Tiongkok dengan mengadakan pameran Investasi dan perdagangan internasional antara eurasia dan Tiongkok Barat dengan menunjukkan produk-produk yang di produksi oleh Tiongkok. Hubungan ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan tajikistan terus berkembang dengan menjadikan Tiongkok sebagai importir terbesar kedua di Tajikistan.

Sebagai negara pecahan Uni Soviet, kondisi perekonomian Tajikistan cukup berbeda dengan negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya terutama dengan negara pecahan Uni Soviet yang berada di wilayah Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Kirgistan. Meskipun Tajikistan memiliki SDA yang besar dalam bidang agrikulturnya, dan memiliki beberapa sumber pangan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, hal tersebut tidak dapat melepaskan Tajikistan dari statusnya sebagai negara termiskin di wilayah Asia Tengah. Oleh sebab itu, berbagai usaha dilakukan oleh Tajikistan yang bertujuan untuk melepas status negara termiskin, berbagai kerjasama dengan negara lain telah dilakukan oleh Tajikistan, dan ketika Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI), Tajikistan merupakan negara pertama yang memutuskan untuk bergabung dalam kebijakan tersebut dan telah menerima banyak bantuan dana dari Tiongkok melalui kebijakan tersebut dengan harapan akan melepaskan Tajikistan dari status negara termiskin.

Kerangka Teori

Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah suatu negara yang melakukan hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kepentingannya dan kepentingan Negara yang diajak melakukan kerjasama tersebut. Dikarenakan negara mempunyai keinginan dan kepentingan yang hendak dicapai, salah satu cara untuk memenuhi kepentingan dan keinginan tersebut dalam melakukan kerjasama dengan Negara lain. K.J. Holsti berpandangan bahwa kerjasama internasional memiliki pengertian pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingannya (K.J. Holsti, 1988).

Setiap negara tidak dapat bertahan di lingkungan internasional atau berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, oleh sebab itu mereka perlu melakukan hubungan internasional dengan melakukan kerjasama internasional dengan Negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya. Kerjasama internasional terbagi atas dua bentuk, yaitu :

- a. Kerjasama Pertahanan – Keamanan
- b. Kerjasama Fungsional : Kerjasama ini biasanya di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Selain bentuk-bentuk diatas, kerjasama internasional dapat dibedakan dari bentuk kerjasamanya seperti kerjasama secara bilateral, multilateral, dan regional. Kerjasama dilakukan sebagai proses pemenuhan keinginan suatu individu atau aktor untuk memenuhi kesejahteraan kelompoknya atau kesejahteraan sendiri. Kerjasama bisa tercipta pada sejauh mana individu atau aktor tersebut percaya bahwa aktor atau individu lainnya dapat diajak bekerjasama. Permasalahan utama dari teori kerjasama internasional adalah pada upaya memenuhi keinginan pribadi atau kelompok, dan hasil dari kerjasama tersebut dapat menguntungkan kedua pihak yang melakukan kerjasama (Dougherty, 2001).

Hutang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor diluar negara tersebut. Penerimaan utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain atau Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa : Utang atau pinjaman berarti sesuatu yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Sedangkan, utang luar negeri merupakan sejumlah dana yang diperoleh dari negara lain (bilateral) atau multilateral yang tercermin dalam neraca pembayaran untuk kegiatan investasi, maupun *saving investment gap* dan *foreign exchange gap* yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (Bank Indonesia, 2014).

Utang luar negeri bisa dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu dari aspek materill, utang luar negeri merupakan arus kas masuk modal dari dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada didalam negeri. Aspek formal mengartikan utang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menujung pertumbuhan ekonomi. Sehingga, berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternative sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan (Astanti, 2015). Penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan

dalam mempercepat pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan, utang khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dalam pembangunan (Ramadhani, 2014). Berdasarkan sumber dana pinjaman, pinjaman dibagi atas :

- a. Pinjaman dari lembaga internasional
Merupakan pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional seperti World Bank Asia dan Development Bank, yang pada dasarnya adalah pinjaman berbunga ringan.
- b. Pinjaman dari negara-negara tetangga
Pinjaman yang didapatkan dari negara yang memiliki hubungan bilateral dengan negara peminjam dana.
Berdasarkan status penerimaan pinjaman, pinjaman dibagi atas :
 - a. Pinjaman pemerintah
Pinjaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
 - b. Pinjaman swasta
Pinjaman yang dilakukan oleh pihak swasta.

Dampak negatif dari hutang luar negeri yaitu timbulnya krisis ekonomi yang seiring berjalannya waktu semakin meluas dan mendalam. Negara akan terbebani dengan pembayaran hutang tersebut sehingga hanya sedikit dari anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan. Cicilan bunga yang makin memberatkan perekonomian negara karena hutang luar negeri selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Dampak negatif jangka panjang dari hutang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi sebuah negara, salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar mata uang negara tersebut jatuh (inflasi) dan negara penerima bantuan tersebut akan mengalami ketergantungan terhadap negara pemberi bantuan (Selvia, 2017).

Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis data yaitu sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipilih ialah studi literatur dimana data-data yang diperoleh bersumber dari buku, jurnal, dan internet (Sugiyono, 2009), kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1994).

Hasil dan Pembahasan

Tajikistan merupakan negara pertama yang memutuskan untuk bergabung dalam kebijakan luar negeri Tiongkok yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI). Sejak dikeluarkan kebijakan BRI, Tajikistan dan Tiongkok melakukan pertemuan serta mempromosikan pembangunan bersama. Keputusan Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon untuk bergabung dalam kebijakan BRI ialah untuk semakin meningkatkan hubungan bilateral dengan Tiongkok.

Pada tahun 2013, Tajikistan dan Tiongkok menjalin kemitraan strategis dan membuat kemajuan yang stabil di semua bidang kerja sama. Pada tanggal 12 September 2013, Presiden Xi Jinping dan Presiden Emomali Rahmon mengadakan pertemuan bilateral selama KTT Bishkek dari Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Kedua pemimpin membuat perencanaan penting untuk membangun dan mengembangkan kemitraan strategis Tiongkok-Tajikistan. Pada 29 November, Perdana Menteri Li

Keqiang dan Perdana Menteri Tajikistan Kahir Rasulzoda mengadakan pertemuan bilateral selama pertemuan ke-12 Dewan Kepala Pemerintahan Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Pada tanggal 29 April, Anggota Dewan Negara dan Menteri Keamanan Publik Guo Shengkun bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Tajikistan Abdurahim Kahorov selama pertemuan kedelapan Sekretaris Dewan Keamanan Negara Anggota SCO. Pada bulan Juli 2014, Ketua Komite Negara Tajikistan untuk Keamanan Nasional Saymum di Yatimov berkunjung ke Tiongkok dan bertemu dengan Anggota Dewan Negara Guo Shengkun.

Dari tanggal 19 hingga 20 Mei 2014, Presiden Tajikistan Emomali Rahmon melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Presiden Tajikistan Emomali Rahmon berbicara dengan Presiden Xi Jinping dan bertemu dengan Ketua NPC Zhang Dejiang dan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli. Kedua presiden menandatangani Deklarasi Bersama tentang Membangun Kemitraan Strategis Antara Tiongkok dan Tajikistan, mewujudkan peningkatan strategis dalam hubungan bilateral. Kerja sama praktis antara kedua negara berkembang pesat. Serangkaian proyek kerja sama utama telah disepakati dan dilaksanakan. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian transit antar pemerintah untuk Jalur D Pipa Gas Tiongkok - Asia Tengah. Terowongan Chormazak, dikerjakan oleh *China Road and Bridge Corporation*, selesai dan dibuka untuk lalu lintas. Pembangkit listrik tenaga batu bara Dushanbe No.2, dikerjakan oleh TBEA Co., Ltd. dari Xinjiang, Tiongkok, terhubung ke jaringan listrik.

Pemerintah Tajikistan memperlakukan BRI sebagai salah satu sumber pendanaan penting untuk membantu pelaksanaan Strategi Pembangunan Nasional / *National Development Strategy* (NDS-2030), terutama dalam hal pendanaan proyek infrastruktur besar seperti jalan, rel kereta api, bandara, dan fasilitas energi (pembangkit listrik, saluran listrik, dll). Presiden Xi Jinping sendiri menyatakan bahwa BRI bermaksud “untuk melengkapi strategi pembangunan nasional dengan memanfaatkan koordinasi kebijakan” (China Briefing, 2021).

Beberapa sektor di Tajikistan telah merasakan manfaat dari kerjasama Tajikistan dan Tiongkok melalui kebijakan BRI. Adapun sektor-sektor ekonomi Tajikistan yang menerima investasi Tiongkok melalui BRI, sebagian besar dipilih oleh Tiongkok mengingat perannya sebagai investor. Sektor-sektor yang menurut investor Tiongkok paling menarik termasuk industri ekstraktif (penambangan emas, perak, logam tanah jarang, batu bara, dll), konstruksi (pabrik semen dan batu bata, pembangunan fasilitas pemerintah yang besar), transportasi (jalan raya, terowongan, dan lain-lain), energi (pembangunan pembangkit listrik dan jaringan listrik) dan pertanian.

Hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok dengan Tajikistan telah mengalami perkembangan yang signifikan setelah bertahun-tahun upaya bersama untuk terus maju dengan Belt and Road Initiative (BRI). Tajikistan adalah salah satu pendukung kuat dalam kerjasama BRI yang dikenal sebagai penandatanganan pertama MoU kerja sama dengan Tiongkok di BRI. Tiongkok sekarang berfungsi sebagai sumber investasi terbesar Tajikistan dan mitra dagang terbesar ketiga, dengan perdagangan bilateral mencapai sekitar 1,51 miliar dolar AS pada 2018 dan investasi langsung Tiongkok di Tajikistan sebesar 95,01 juta dolar AS pada 2017. Perdagangan dua arah bahkan diproyeksikan melebihi tiga miliar dolar AS selama beberapa tahun ke depan.

Hubungan kedua negara juga terjalin melalui kegiatan ekspor-impor yang dilakukan keduanya. Pada tahun 2021, Tajikistan mengekspor 159 juta dollar ke

Tiongkok. Produk utama yang diekspor Tajikistan ke Tiongkok adalah Emas (119 juta dollar), Bijih Lainnya (9,18 juta dollar), dan Kapas Mentah (7,37 juta dollar). Selama 26 tahun terakhir ekspor Tajikistan ke Tiongkok telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 11,9%, dari 8,6 juta dollar pada tahun 1995 menjadi 159 juta dollar pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, Tiongkok mengekspor 1,62 miliar dollar ke Tajikistan. Produk utama yang diekspor Tiongkok ke Tajikistan adalah Alas Kaki Karet (85,4 juta dollar), Besi Rol Datar Berlapis (79,3 juta dollar), dan Kendaraan bermotor; suku cadang dan aksesoris (8701 hingga 8705) (56,1 juta dollar). Selama 26 tahun terakhir ekspor Tiongkok ke Tajikistan telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 19,9%, dari 14,6 juta dollar pada tahun 1995 menjadi 1,62 miliar dollar pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Tajikistan berada di peringkat 94 dalam Indeks Kompleksitas Ekonomi (ECI - 0,69), dan total ekspor ke-145 (2,1 miliar dollar). Pada tahun yang sama, Tiongkok berada di peringkat 25 dalam Indeks Kompleksitas Ekonomi (ECI 1,07), dan peringkat 1 dalam total ekspor (3,34 triliun dollar).

Dampak Kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok Terhadap Perekonomian Tajikistan Tahun 2018-2022

Tajikistan adalah salah satu mitra terdekat Tiongkok dalam kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) dan Tajikistan menjadi negara pertama yang menandatangani perjanjian kerjasama dalam kerangka BRI tersebut. berlandaskan hubungan yang sudah terjalin dari tahun 1992, Tiongkok memberikan berbagai macam bantuan finansial kepada Tajikistan untuk membangun negaranya. Tajikistan merupakan negara termiskin di wilayah Asia Tengah dan salah satu negara termiskin di dunia. Oleh sebab itu, Tajikistan membutuhkan bantuan-bantuan untuk membangun infrastruktur serta mengembangkan ekonominya. Tetapi, pinjaman dana yang diberikan oleh Tiongkok melalui kebijakan BRI kepada Tajikistan tidak membuat kondisi Tajikistan semakin membaik, bahkan utang luar negeri Tajikistan kepada Tiongkok semakin membesar. Dari kerangka kerjasama dalam BRI antara Tiongkok dan Tajikistan terdapat dampak positif serta dampak negara bagi kondisi Tajikistan.

a. Dampak Positif

Kerjasama Tajikistan dengan Tiongkok dalam kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) memberikan dampak terhadap negara Tajikistan. Pemerintah Tajikistan beranggapan bahwa kebijakan ini akan menolong negara mereka yang menyandang status sebagai salah satu negara termiskin di wilayah Asia Tengah. Dimulai dengan ditandatanganinya MoU kesepakatan kerjasama kedua negara dalam koridor BRI di tahun 2013, telah banyak pinjaman dana yang diberikan oleh Tiongkok untuk berbagai macam pembangunan infrastruktur yang ada di Tajikistan.

Pada tahun 2018, Tiongkok melalui kebijakan BRI memberikan bantuan dana yang dialokasikan untuk pembangunan gedung pemerintahan dan parlemen Tajikistan serta penyediaan kendaraan di Kota Dushanbe. Proyek tersebut didanai oleh pemerintah Tiongkok dan bernilai sebesar 130.1 juta dollar.

Kemudian di tahun 2019, kebijakan BRI ini juga memberikan bantuan sebesar 115.6 juta dollar untuk pengembangan dan pelaksanaan Proyek Perbaikan Jalan Perkotaan tahap ke-3 di kota Bokhtar dan Kulob Bagian dari segmen utama proyek pembangunan Jalan Raya Dushanbe - Kulma tahap ke-2. Proyek pembangunan jalan raya Dunshanbe – Kulma ini sebelumnya dimulai pada tahun 2012 dengan dana pinjaman lunak yang diberikan oleh Tiongkok oleh Tajikistan dan bukan bagian dari

kebijakan BRI. Pada tahap pertama di tahun 2012 tersebut, pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok dalam membangun jalan raya Dushanbe – Kulma bernilai sebesar 51 juta dollar.

Kemudian pembangunan infrastruktur Tajikistan yang dilakukan oleh Tiongkok sempat terhenti di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda kedua negara tersebut serta dunia. Pembangunan kembali dilanjutkan pada tahun 2021 pembangunan bagian utama dari tahap ke-2 jalan raya Dushanbe - Kulma dan pelaksanaan proyek lain yang disepakati oleh Tajikistan dan Tiongkok dilanjutkan dimana proyek ini bernilai 123.5 juta dollar. Nominal ini lebih tinggi dibanding pembangunan jalan raya Dushanbe – Kulma di tahun 2019 yang bernilai 115.6 juta dollar serta pembangunan jalan raya Dushanbe – Kulma pada tahun 2012 yang bernilai 51 juta dollar.

Kebijakan BRI Tiongkok juga memberikan dampak positif lain bagi Tajikista yaitu terhubungnya Tajikistan dengan negara-negara lain melalui jalur transportasi. Meskipun hanya satu rute koridor BRI yang melewati Tajikistan, Dushanbe dapat terhubung ke tujuan di rute lain yang lebih maju karena terhubung ke Almaty, Osh, dan Tashkent. Rute koridor BRI yang melewati Tajikistan menghubungkan Dushanbe ke Tiongkok di timur dan Afghanistan serta Iran di barat daya. Sebagian besar rute ini melalui jalan darat kecuali untuk segmen Dushanbe – Nizny Panj yang melalui jalur kereta api dan jalan raya. Pengirim Tajikistan juga dapat terhubung ke tujuan di empat rute lainnya melalui Almaty, Osh dan Tashkent karena dua kota besar Tajikistan terhubung dengan mereka melalui jalan darat.

Dua rute koridor BRI antara Tiongkok dan Eropa melalui Kazakhstan telah membuat kemajuan paling besar dibandingkan lebih dari satu dekade yang lalu ketika transportasi kereta api di antara keduanya tidak lebih cepat dari pengiriman melalui laut. Kereta blok pertama melakukan perjalanan pada tahun 2011 antara Chongqing (Tiongkok) dan Duisburg (Jerman) melalui Kazakhstan dan Rusia dalam 16 hari, setengah dari waktu yang dibutuhkan melalui laut. Sejak lalu ada kemajuan luar biasa di sepanjang dua rute ini. Frekuensi kereta Tiongkok-Eropa sekarang telah meningkat menjadi lebih dari 10 per hari dan perusahaan logistik internasional dan lokal menawarkan berbagai layanan termasuk peti kemas berpendingin, pengiriman muatan peti kemas kurang dari penuh, pengiriman dari pintu ke pintu dan jadwal yang diumumkan sebelumnya. Perbaikan di rute koridor BRI hingga saat ini serta infrastruktur transportasi Tajikistan sendiri telah mengurangi waktu tempuh dari Dushanbe dan Khujand ke banyak tujuan di sepanjang lima rute.

Akibat pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Tiongkok di Tajikistan dalam koridor BRI membuat konektivitas transportasi juga semakin membaik. Waktu perjalanan dengan mobil antara Dushanbe dan Khujand telah berkurang dari lebih dari 10 jam menjadi sekitar 5 jam. Selain itu, Khujand, di utara negara itu, terhubung dengan baik ke kota-kota di provinsi Sughd seperti Isfara, Panjakent, Gafurov, dan Istaravshan melalui jalur kereta api dan jalan raya, sementara hubungannya dengan provinsi Dushanbe dan Khatlon hanya melalui jalan darat. Dushanbe, yang terletak di lembah Gissar, juga dihubungkan oleh rel dan jalan raya ke kota-kota di sekitar wilayah tengah dan di provinsi Khatlon, tetapi hanya melalui jalan darat ke bagian utara Tajikistan. Provinsi Sughd juga telah memperbaiki sambungan jalannya ke perlintasan perbatasan dengan Uzbekistan dan Republik Kyrgyz melalui rehabilitasi jalan Kuchkak, Kim, Isfara, dan Guliston yang baru saja diselesaikan serta jalan Dehmoi, Proletarsk dan Madaniyat.

Dari pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh Tiongkok kepada Tajikistan, kondisi perekonomian Tajikistan tidak banyak mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan pembangunan yang diberikan oleh Tiongkok merupakan bantuan dana yang harus dibayar kembali oleh Tajikistan. Kemudian, budaya korupsi yang masih terdapat di pemerintahan Tajikistan menyebabkan keadaan ekonomi Tajikistan hanya menguntungkan segelintir pihak saja, bahkan Presiden Tajikistan. Para pemimpin pemerintahan Tajikistan sepenuhnya setuju dengan tujuan dari BRI, tetapi mereka melihat proyek tersebut sebagai peluang ideal untuk mendapatkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Kebijakan BRI memperkuat kekuasaan yang dipegang oleh elit Tajikistan dan memfasilitasi Patrimoni dan Kleptokrasi di dalam negeri, korupsi semakin meningkat, terutama di dalam lingkungan keluarga Presiden yang memiliki banyak posisi kuat di pemerintahan (Digital Commons, 2022). Oleh sebab itu, meskipun infrastruktur Tajikistan telah dibangun oleh Tiongkok, tetapi kondisi perekonomian Tajikistan tidak membaik dikarenakan budaya korupsi masih sangat tinggi dan bantuan dari Tiongkok banyak disalahgunakan oleh para elit Tajikistan.

Dampak positif yang dirasakan oleh Tajikistan dari kerjasama internasional yang dilakukan dengan Tiongkok melalui kebijakan BRI sejalan dengan pengertian dari K.J Holsti yang memiliki pandangan bahwa kerjasama internasional memiliki pengertian pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingannya.

Harapan bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain akan membantu sebuah negara mendapatkan kepentingannya tergambar dari Tajikistan yang mendapatkan dampak positif dari kerjasamanya dengan Tiongkok melalui kebijakan BRI. Dengan melakukan kerjasama dengan Tiongkok, Tajikistan mendapatkan peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang membuat kota-kota yang ada di Tajikistan lebih terintegrasi, rakyat lebih sejahtera dengan dibangunnya sekolahan-sekolahan serta pembangunan transmisi listrik yang dapat dirasakan oleh banyak masyarakat Tajikistan.

b. Dampak Negatif

Meskipun terdapat peningkatan yang disebabkan oleh pinjaman yang diberikan Tiongkok kepada Tajikistan, kesenjangan yang signifikan dalam koneksi transportasi tetap ada. Yang pertama adalah sambungan rel antara Khujand dan Dushanbe yang hilang; setiap kota terhubung ke jaringan rel utara dan tengah masing-masing, tetapi tidak satu sama lain. Celah rel kedua berada di sepanjang koridor BRI rute lima, meskipun proyek rel BRI yang menghubungkan Kashgar, Irkehstam, Sary Tash, Karamyk, dan Dushanbe direncanakan. Juga harus ada peningkatan infrastruktur kereta api yang ada di rute kereta api tengah dan selatan negara itu, penggantian sarana perkeretaapian yang sudah tua serta peningkatan tiga pelabuhan kering di perbatasan dengan Uzbekistan, Republik Kyrgyz dan Afghanistan. Selain itu, sebagian besar penduduk pedesaan tetap tidak memiliki akses ke jalan sepanjang musim.

Meskipun Tiongkok tampaknya merupakan pilihan yang lebih baik, dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Namun hal ini membuat Tajikistan beresiko terlilit hutang dengan Tiongkok. Utang Tajikistan telah meningkat dari 28% PDB pada tahun 2014 menjadi 50% pada tahun 2017, didorong oleh defisit fiskal yang lebih tinggi dan depresiasi somoni yang signifikan. Pertukaran jatuh tingkat telah menimbulkan beberapa masalah bagi perekonomian nasional karena telah membuat

impor lebih mahal dan telah menaikkan nilai jumlah yang terhutang kepada kreditur. Per 1 Januari 2022, sekitar USD 505 juta telah dibayarkan dari anggaran negara untuk melunasi pinjaman dari Tiongkok ini, termasuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Selain utang, Tajikistan mengalami krisis tenaga kerja lokal dikarenakan Tajikistan tidak mempunyai undang-undang yang mewajibkan perusahaan asing untuk mempekerjakan pekerja lokal. Secara tidak langsung Tajikistan terus bergantung pada tenaga kerja asing daripada memperbaiki kondisi pasar domestik.

Dampak negatif yang dirasakan oleh Tajikistan yang diakibatkan oleh kebijakan luar negeri Tiongkok (BRI) yaitu meningkatnya hutang luar negeri Tajikistan. Hutang luar negeri Tajikistan ini tergolong dari 2 jenis bantuan, pertama yaitu bantuan proyek dimana Tiongkok membantu dan memberikan investasi dalam pembangunan infrastruktur di Tajikistan. Kedua, bantuan tenaga dimana perusahaan asing dan dalam negeri dari Tajikistan menggunakan tenaga asing dalam menjalankan perusahaan yang menyebabkan Tajikistan secara fungsional tergantung dengan adanya bantuan tenaga kerja asing dibanding mengupayakan tenaga lokal. Kedua jenis bantuan yang diterima oleh Tajikistan tersebut sesuai dengan dua dari tiga jenis bantuan dari pengertian konsep Utang Luar Negeri.

Pendanaan yang didapatkan Tajikistan dari Tiongkok digunakan untuk pembangunan infrastruktur negaranya juga sesuai dengan pengertian dari pemanfaatan Utang Luar Negeri yaitu penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mempercepat pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan, utang khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dalam pembangunan.

Tajikistan merupakan sebuah negara dengan ekonomi rendah di wilayah Asia Tengah dan merupakan salah satu negara termiskin di kawasan ini, dengan ekonomi yang sangat bergantung pada pertanian, pengiriman uang dari pekerja migran. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di Tajikistan, salah satu upaya dari Pemerintah Tajikistan ialah dengan melakukan kerjasama dengan European Training Foundation (ETF) untuk melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan kejuruan sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Tajikistan (Etf.europa.eu, 2022).

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Tajikistan ialah dengan mengajukan pinjaman dana sebesar 50 juta dollar kepada World Bank untuk melaksanakan Development Policy Operation (DPO) Tajikistan. DPO akan mendukung program reformasi Tajikistan, yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Worldbank.org, 2022).

Kesimpulan

Tajikistan dan Tiongkok memiliki hubungan yang telah terjalin lebih dari 2 dekade. Selain memiliki letak geografis yang berdekatan, Tiongkok merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Tajikistan. Hubungan yang sudah terjalin baik tersebut semakin erat setelah terlibatnya Tajikistan pada kebijakan luar negeri Tiongkok, yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) di tahun 2013. Tajikistan merupakan negara pertama yang bergabung dalam kebijakan tersebut di tahun 2013 melalui presiden Emomali Rahmon. Bergabungnya Tajikistan dalam kebijakan BRI tersebut membuat banyak terjadi pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok. Pembangunan sekolah, pembangunan gedung pemerintahan dan parlemen,

pembangunan aliran listrik hingga pembangunan jalan raya dan rel kereta api dilakukan oleh Tiongkok di Tajikistan melalui koridor BRI tersebut.

Kebijakan BRI memberikan dampak bagi negara Tajikistan. Dampak positif yang diterima oleh Tajikistan ialah pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan rel kereta api membuat kota-kota di Tajikistan menjadi terhubung dan memangkas waktu perjalanan masyarakat Tajikistan. Pembangunan jaringan transmisi listrik bertegangan tinggi juga memberikan aliran listrik yang merata di kota-kota yang ada di Tajikistan serta pembangunan sekolah juga memberikan kemudahan bagi anak-anak di Tajikistan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Tetapi, Kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) tidak selamanya memberikan keuntungan bagi negara-negara yang bergabung dalam kebijakan BRI Tiongkok tersebut, bahkan terdapat negara yang mengalami kerugian dengan bergabung dalam kebijakan BRI Tiongkok, salah satunya adalah Tajikistan. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Tiongkok di Tajikistan menyebabkan pemerintah Tajikistan memiliki utang yang besar kepada Tiongkok dan pada tahun 2022, total utang Tajikistan kepada Tiongkok mencapai 1.98 miliar dollar.

Daftar Pustaka

- AIIB <https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html>
- Astanti A. 2015. Analisis Kausalitas antara Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990-2013. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62864>
- Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/seki/Documents/Metadata_SEKI_ULN_Indo_2014_rev.docx
- Changani. <https://www.specialeurasia.com/2022/08/01/tajikistan-Tiongkok-cooperation/>
- Chiba. What Is Tiongkok's Belt and Road, <https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-Tiongkoks-belt-and-road-initiative-bri>
- China Briefing. <https://www.china-briefing.com/news/china-tajikistan-bilateral-investment-and-trade-ties>
- Devi, Selvia Inca. 2017. Pengaruh PDB, Pengeluaran Pemerintah, dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia. INA-Rxiv Papers. <https://osf.io/preprints/inarxiv/qe3vd/>
- Eurasia <https://eurasianet.org/tajikistan-the-cost-of-chinese-debt>
- James E. Dougherty, *Contending Theories of Internasional Relations: A Comprehensive Survey*, 5th Edition, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, 2001
- K.J Holsti, 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, kota Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Khusyenov <https://digitalcommons.denison.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=student-scholarship>
- McBride. Chinas massive belt and road initiative. <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>

-
- Muhammad Adib Ramadhani. 2014. Pengaruh Defisit Anggaran, Pengeluaran Pemerintah dan Hutang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 6 Negara ASEAN Tahun 2003-2012). E-Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Vol 2, No 1
- Silk Road Fund. <http://www.silkroadfund.com.cn/cnweb/19906/19922/index.html>
- Skill Development and Poverty Reduction in Tajikistan https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/C12578310056925BC125739B0056D8A7_NOTE797LJD.pdf
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Hal. 224.
- Koentjaraningrat. 1994. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Tajikistan to Enhance Sustainable and Resilient Economic Growth with World Bank Support <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/01/12/tajikistan-to-enhance-sustainable-and-resilient-economic-growth-with-world-bank-support>
- The Economic Implications of the Belt and Road Initiative through Case Studies of Tajikistan and Italy <https://digitalcommons.denison.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=studentscholarship>. *The ETIM: China's Islamic Militants and the Global Terrorist Threat*. California: Praeger.
- United Nations. 2008. "Shanghai convention on combating terrorism, separatism and extremism", dalam *International Instruments Related to the Prevention and Suppression of International Terrorism*. New York: United Nations.
- United States Department of State. 2002. *Laporan Patterns of Global Terrorism 2001*. Washington D.C.: United States Department of State.
- Wright, Teresa. 2001. *The Perils of Protest: State Repression and Student Activism in China and Taiwan*. Honolulu: University of Hawai'i Press.